



STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Carunia Mulya Firdausy & Endang S Soesilowati



Economic Research Center
Indonesian Institute of Sciences
4th-5th Fl. Widya Graha LIPI, Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta
Telp. +6221 5207120
www.ekonomi.lipi.go.id

POLICY BRIEF 2018

Economic Research Center Paper Series is published electronically by Economic Research Center, Indonesian Institute of Sciences

©Copyright is held by the author or authors of each Policy Brief

Economic Research Center Policy Brief cannot be republished, reprinted, or reproduced in any format without the permission of the paper's author or authors.

Note: The views expressed in each paper are those of the author or authors of the paper. They do not necessarily represent or reflect the views of the Economic Research Center, its Editorial Committee or of Indonesian Institute of Sciences.

The Economic Research Centre - Indonesian Institute of Sciences (P2E-LIPI) is one of the Indonesian Government Research Institutes established in 1967. P2E-LIPI plays a leading role in the field of economic and development policy research. The Centre is previously known as The National Economic and Social Institution (Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional/ LEKNAS), then LEKNAS-LIPI was reorganized into the Centre for Economics and Development Studies -Indonesian Institute of Sciences (Pusat Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan/PEP-LIPI) in 1986. Based on President Decree No. 178/2000 on December 15th, 2000 and LIPI Director Decree No.1151/M/2001 June, PEP-LIPI has been renamed to the Economic Research Center – Indonesian Institute of Sciences (Pusat Penelitian Ekonomi/P2E-LIPI) in 2001. P2E-LIPI consists of three Research Group: Regional Development, Industrial and Trade, Finance and Banking. The main objective of P2E is to advice the government on all economic and development issues, both on national and international economic issues. The focus issues are poverty reduction; economic governance and competitiveness; and infrastructure. The center also carries out joint research, in collaboration with domestic and international research institutions.

POLICY BRIEF

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PARIWISATA DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Defisit neraca perdagangan (*trade account deficit*) yang mengakibatkan besarnya defisit transaksi berjalan (*Current Account Deficit-CAD*) yang telah melewati angka 3 persen PDB pada triwulan III tahun 2018 mutlak harus mendapat perhatian serius pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Belum lagi jika memperhitungkan persoalan beban utang dan kebutuhan pembiayaan pemerintah termasuk pembiayaan infrastruktur yang nyaris sulit untuk dihentikan. Jika masalah ini tidak diatasi, situasi ini dapat menimbulkan kerentanan terhadap nilai tukar rupiah yang ujungnya dapat menimbulkan *rush* pada permintaan dolar Amerika dan semakin rentannya perekonomian nasional memasuki tahun 2019.

Badan Pusat Statistik (2018) mencatat defisit neraca transaksi berjalan (CAD) per Triwulan III 2018 sebesar 8,846 miliar dolar AS atau 3,37 persen PDB. Sedangkan beban utang per Oktober 2018 mencapai nilai 360,532 miliar dolar AS atau sebesar Rp. 5.236 triliun dengan asumsi nilai kurs rupiah terhadap dollar sebesar Rp. 14.523.

Utang tersebut terdiri dari utang luar negeri swasta, termasuk BUMN sebesar 182,197 dolar AS dan utang pemerintah dan Bank Sentral senilai 178,335 dolar AS. (baca juga Kompas 18 dan 19 Desember 2018). Lantas, kebijakan apa yang harus dilakukan memperbaiki persoalan di atas?

Tentu kebijakan yang harus dipilih tidak boleh bertentangan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini semakin diperlukan sebagai akibat dinamika perekonomian global yang masih belum dapat dipastikan dengan semakin intensifnya berbagai negara besar melakukan pembatasan perdagangan (*trade friction*) dan peningkatan hambatan non-tariff (*no-tariff barriers*) termasuk perang dagang antara AS dan China. Belum lagi tantangan revolusi Industri 4.0 yang telah mengubah struktur dan *landscape* perekonomian dari penggunaan elektronika dan teknologi informasi (industri 3.0) ke penggunaan *cyber physical system* seperti *Internet of things*, *3 D printing*, *artificial intelligence*, *bioengineering*, *cloud computing*, *nano*

technology, new efficient and intelligent materials (Devezas et. al., 2017).

Benar memang pemerintah telah menyikapinya dengan berbagai kebijakan fiskal, non-fiskal, moneter dan perdagangan seperti insentif pajak, investasi berorientasi ekspor, kebijakan pengembangan ekspor ke negara non tradisional, kebijakan suku bunga, dan bahkan juga telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 16 maupun kebijakan industri bertemakan “Making Indonesia 4.0”. Selain berbagai kebijakan ekonomi di atas, kebijakan pengembangan sektor pariwisata juga menjadi salah satu pilihan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sejak 2012.

SEKTOR PARIWISATA MENJADI UNGGULAN DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

Wujud perhatian konkrit kebijakan pengembangan sektor pariwisata telah dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (2010-2025). Dalam Rencana Induk tersebut dijelaskan lima kebijakan dan strategi dalam pengembangan pariwisata. Pertama, mencakup strategi pengembangan pariwisata yang dirancang mencakup kewilayahan menjadi Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK), seperti Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Mandalika, dan Morotai. Keempat destinasi itu menjadi kawasan yang dipandang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah dan diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya tarik investor.

Kedua, pembangunan daerah tujuan wisata (DTW) dengan menciptakan “10 Bali baru”, mulai dari Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, hingga Morotai di Maluku Utara. Ketiga, pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan transportasi. Keempat, pemberdayaan masyarakat melalui program sadar wisata. Kelima, strategi promosi (*branding, advertising, dan selling*), termasuk penyelenggaraan *event-event internasional (meeting, incentives, conference and exhibition – MICE)* serta wisata halal.

Mutlak pentingnya pengembangan sektor pariwisata ini tentu tidak dapat diragukan lagi. Hal ini bukan saja karena besarnya potensi pariwisata nasional yang belum digali secara optimal, tetapi juga karena sektor ini relatif lebih “tahan banting”

(*resilience*) terhadap krisis atau guncangan ekonomi, termasuk di era ketidakpastian ekonomi global yang sedang terjadi saat ini dan yang diperkirakan terjadi di masa mendatang. Selain itu, pariwisata juga memiliki sifat inklusif karena mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Hal ini karena dengan adanya pariwisata, berbagai kegiatan ekonomi skala besar dan kecil maupun mikro dapat berkembang (kuliner, kerajinan, sewa kendaraan, penginapan/hotel, dan lain-lain).

Tentu banyak lagi karakteristik sektor pariwisata yang tidak dimiliki sektor ekonomi lainnya seperti karakteristik terkait faktor lokalistik/daerah spesifik (misalnya, keindahan alam, budaya, keramahan penduduk), faktor siap jual, dan tidak dapat direplikasi oleh faktor teknologi dalam bentuk apapun. Apalagi konsumen saat ini, dengan semakin canggihnya alat komunikasi dan informasi digital semakin banyak memberikan perhatian untuk menempatkan pengeluarannya melalui perjalanan wisata. Singkatnya, pariwisata merupakan sektor atau industri "*quick yielding*" untuk meningkatkan penerimaan negara dan devisa nasional yang belakangan ini mengalami tekanan baik sebagai akibat

tekanan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, beban utang dan defisit neraca perdagangan.

PERMASALAHAN DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA

Besarnya potensi dan kondisi kekinian sektor pariwisata ini belum dioptimalkan. Hal ini ditunjukkan dari angka kontribusi yang rendah sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sejak tahun 2012 hingga 2016, sektor pariwisata tumbuh rata-rata hanya 4,08 persen per tahun. Pada tahun 2016, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional pada tahun 2016 sebesar 4,03 persen dengan total nilai 500,19 triliun rupiah, dengan penyerapan tenaga kerja 12 juta orang (Kementerian Pariwisata, 2016). Kemudian, pada tahun 2017 tercatat kontribusi sektor pariwisata hanya mampu mencapai angka 5.8 persen terhadap PDB.

Kontribusi tersebut nyaris tiga kali dibawah kontribusi pariwisata negara Malaysia (15.4%) dan bahkan nyaris empat kali dibawah Thailand (21.2 %). Demikian pula dalam hal pemasukan devisa negara, sektor ini hanya mampu memberikan devisa sebesar 14,4 milyar dolar AS. Sementara Thailand dan Malaysia mampu

memasukkan devisa dari sektor ini masing-masing sebesar 59,6 Milyar dolar AS dan 18.5 milyar dolar AS (Kementerian Pariwisata, 2017).

Rendahnya Kualitas Daya Saing SDM Pariwisata

Relatif rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di atas salah satu penyebab utamanya yakni ***rendahnya kualitas daya saing SDM*** di sektor ini (Kementerian Pariwisata, 2017). Walaupun tenaga kerja Pariwisata dianggap merupakan tenaga yang paling siap untuk bisa memenuhi standar *Mutual Recognition Arrangements* (MRA) yang ditetapkan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dibandingkan dengan tenaga kerja di sektor lainnya, data dari World Economic Forum yang dikeluarkan pada tahun 2017 tentang ranking *Travel and Tourism Competitive Index*, untuk komponen SDM Indonesia menduduki ranking ke 64 (dari 136 negara) dengan skor 4.6 (dari 7). Ranking tersebut jauh lebih rendah dari secara keseluruhan yang menduduki posisi di ranking 42. Bahkan ranking SDM tersebut menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2015, yaitu dari 55 terhadap 141 negara menjadi 64 dari 136 negara, dibandingkan

indeks secara keseluruhan dari 50 menjadi 42.

Kualitas daya saing SDM yang rendah tersebut juga dikonfirmasi dari hasil temuan di dua lokasi (Provinsi Bali dan Nusatenggara Barat). Hal ini antara lain ditunjukkan dari rendahnya kemampuan berbahasa asing, pelayanan, penampilan, dan kebersihan. Pekerja pariwisata di Indonesia masih didominasi oleh pekerja tidak terdidik, sehingga produktivitasnya rendah. Disisi lain, standar kebutuhan SDM untuk bidang pariwisata dan sektor jasa lainnya menuntut kriteria kemampuan yang amat spesifik.

Terbatasnya Infrastruktur dan Kendala Tata Kelola Pendidikan Pariwisata serta Sertifikasi

Rendahnya kualitas daya saing SDM Pariwisata juga disebabkan kendala yang dihadapi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi, maupun industri dalam mengakselerasi kondisi SDM Pariwisata diantaranya kurangnya sarana dan prasarana laboratorium tempat pelatihan siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berkomunikasi bahasa asing terutama bahasa Inggris, dan pemanfaatan teknologi yang belum

optimal. Selain itu, masih terjadi kekurangan tenaga pengajar.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dikawasan Pariwisata

Dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, peran masyarakat menjadi unsur penting. Namun kenyataannya, masih banyak masyarakat di kawasan tersebut yang belum sepenuhnya memiliki kesadaran mengenai pariwisata sehingga kompetensi di bidang ini masih kurang, kemampuan

komunikasi yang masih terbatas, kondisi sanitasi dan kebersihan yang masih minim. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi pengembangan SDM mutlak diperlukan agar potensi dan rencana untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penyumbang PDB terbesar dapat terwujud.

REKOMENDASI

Berdasarkan berbagai permasalahan sebagaimana dikemukakan, diusulkan beberapa rekomendasi berikut :

Mendukung 6 strategi yang diusulkan Kementerian Koordinator Perekonomian (2018) dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang pariwisata

Kementerian Koordinator Perekonomian telah mengusulkan 6 strategi peningkatan kualitas SDM Pariwisata, yaitu (1) Memperbaiki Lembaga Pendidikan diantaranya memperbanyak tenaga pendidik produktif melalui *training of trainers* (ToT), menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, memperbaiki proses akreditasi, memperbaiki aturan penerimaan dan ujian akhir siswa, dan mengoptimalkan penggunaan *e-learning*; (2) Mengembangkan Standar Kompetensi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki proses sertifikasi

kompetensi agar dapat direkognisi oleh industri dan meningkatkan akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); (3). Membangun Ekosistem Pemagangan. Dengan upaya antara lain meningkatkan jumlah peserta pemagangan bersertifikat dan mengoptimalkan keterlibatan industri dalam program pemagangan serta memperbaiki skema pemagangan; (4). Meningkatkan Sarana & Prasarana. Hal ini dilakukan dengan memberikan kemudahan pengelolaan *teaching factory*, penyediaan sarana dan prasarana minimal untuk kegiatan praktik dan pengoptimalan keterlibatan

industri dalam menyediakan sarana dan prasarana; (5). Memobilisasi Pendanaan. Terkait optimalisasi pendanaan dilaksanakan beberapa strategi seperti memberikan insentif pajak bagi industri yang mendorong pengembangan vokasi, merealokasi anggaran pemerintah ke pendidikan vokasi dan terakhir menyusun skema *Unemployment Benefit* dan *Skill Development Fund*; dan (6)

Mengaktifkan Koordinasi. Fungsi koordinasi penting untuk dilakukan dalam upaya dukungan dan keselarasan. Untuk itu dibutuhkan koordinasi dengan kementerian, daerah & KADIN yang dalam jangka panjang membentuk lembaga vokasi nasional, meningkatkan jumlah komite vokasi di daerah dan menyusun *online job platform*.

Melakukan Perbaikan Orientasi Kebijakan Ketenagakerjaan

Kebijakan dan strategi pengembangan SDM sektor pariwisata kini dan ke depan tidak boleh lagi bersifat konvensional yakni sebatas menambah jumlah SDM di sektor ini atau hanya dimaksudkan menggeser kurva supply (*shift of supply curve*). Kebijakan dan strategi pengembangan SDM kini dan kedepan harus juga memperhatikan pasokan kualitas (*skills*) yang memenuhi permintaan pasar kerja. Hal ini mutlak penting karena pasar tenaga kerja di sektor ini telah berubah dan semakin kompleks baik sebagai akibat perubahan struktur ekonomi, globalisasi ekonomi, maupun kemajuan teknologi dengan hadirnya revolusi industri 4.0. Dengan kata lain kebijakan dan strategi

SDM pariwisata yang ditetapkan tidak boleh lagi difokuskan sebatas menyeimbangkan antara pasokan (*supply*) dan permintaan (*demand*) tenaga kerja di sektor ini, tetapi harus pula ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daya saing SDM nasional di atas daya saing SDM sektor pariwisata negara lain dan perubahan teknologi dan informasi digital 4.0.

Melakukan Reformasi Pendidikan dan Keterampilan Pariwisata melalui kerjasama Pemerintah dan Pelaku Usaha serta Akademisi

Reformasi pendidikan dan keterampilan secara komprehensif dalam pengembangan SDM di sektor pariwisata yang sesuai dengan pasar tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan serta keterampilan yang diperlukan sektor ini merupakan kebijakan utama yang harus ditetapkan pemerintah. Reformasi ini juga harus memperhatikan kemajuan teknologi digital 4.0 dan globalisasi ekonomi. Hal ini karena globalisasi dan kemajuan teknologi digital 4.0 tidak hanya memerlukan SDM yang memiliki keterampilan teknis saja, tetapi juga kemampuan SDM non-teknis untuk menyikapi kemajuan teknologi digital dan globalisasi serta implikasi negatif globalisasi terhadap sektor ini. Pentingnya kedua keterampilan teknis dan non teknis yang dimiliki SDM ini dimaksudkan agar “*mismatch* antara *supply* dan *demand* SDM” di sektor ini dapat dihindari.

Dalam menjalankan kebijakan ini, strategi yang dilakukan tidak boleh lagi didominasi oleh pihak pemerintah saja, melainkan perlu diperluas dengan melibatkan peran pihak swasta atau pelaku usaha sektor pariwisata. Pentingnya keterlibatan pihak

pelaku usaha ini karena berdasarkan pengalaman masa lalu berbagai kebijakan dan program pendidikan dan latihan di sektor pariwisata oleh pemerintah tidak efektif dalam implementasinya di lapangan.

Selain kerjasama dengan pelaku usaha di sektor ini, kerjasama antara pemerintah, akademisi dan pelaku usaha juga diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar program keterampilan SDM yang ditetapkan lebih berkualitas yang tidak hanya mampu dalam memenuhi kebutuhan teknis yang diperlukan sektor ini tetapi juga kebutuhan non teknis dalam pengembangan sektor ini. Review secara komprehensif terhadap kurikulum pendidikan dan keterampilan yang telah ada perlu terus menerus disesuaikan (*updating*) dengan permintaan SDM di sektor ini.

Adapun bentuk perbaikan kualitas SDM dimaksud tidak hanya terbatas pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan saja (seperti penguasaan bahasa, pelayanan, keramahan, keamanan, kenyamanan, dan

penampilan), melainkan juga peningkatan pengetahuan SDM dalam bidang kesehatan (hygiene, pertolongan sakit pasien, kebersihan, dan sejenis lainnya). Peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan kesehatan bagi SDM pariwisata tersebut harus diarahkan untuk mencapai standar dan manajemen baku yang berskala global.

Untuk itu diperlukan para pendidik dan pelatih di tubuh Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata (LSPP), BNSP, perguruan tinggi pariwisata dan lembaga pendidikan dan pelatihan baik formal dan informal

lainnya yang berkualifikasi, profesional dan berpengalaman di lingkup global (bukan hanya pada lingkup ASEAN saja) dan tidak terbatas pada pendidik dan pelatih lokal yang pengetahuan dan pengalamannya terbatas. Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 yang mengatur SDM di bidang pariwisata perlu untuk di *update* menyesuaikan perkembangan era digital saat ini. Ini berarti SDM pariwisata dan sektor yang terkait didalamnya harus memahami teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur jasa pariwisata.

Memberikan Insentif kepada Pelaku Usaha di Sektor Pariwisata

Untuk melibatkan pelaku usaha sektor pariwisata menjalankan kebijakan reformasi pendidikan dan ketrampilan SDM secara komprehensif, strategi yang dapat dilakukan yakni dengan memberikan insentif kepada pelaku usaha. Insentif dapat dilakukan dengan pemberian keringanan pajak (*tax incentives*) terhadap industri pariwisata skala besar dan menengah atau *cost sharing* antara pemerintah dengan industri pariwisata

berskala besar atau menengah. Sedangkan bagi pelaku usaha kecil atau sejenisnya di sektor ini, bantuan berupa subsidi atau sejenisnya dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas SDM sektor pariwisata. Dengan strategi ini kualitas SDM pada industri pariwisata skala besar dan menengah yang berhubungan secara langsung (seperti Hotel, Café, dan *home stay*) dan sektor usaha kecil/informal yang tidak terkait langsung dengan industri pariwisata (seperti kuliner, kerajinan

tangan, dan transportasi) dapat ditingkatkan.

Mempertimbangkan Karakteristik Lokal dan Melibatkan Peran Pemerintah Daerah

Dalam pelaksanaan strategi di atas, perhatian pada potensi, kondisi, karakteristik dan nilai-nilai sosial budaya daerah mutlak diperlukan. Hal ini karena masing-masing daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda. Untuk itu keterlibatan daerah dalam menjadikan industri pariwisata dalam arti luas (industri besar, menengah dan kecil) di daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional tidak dapat dihindari. Keterlibatan daerah ini dapat berbentuk penataan lembaga yang berkepentingan (formal maupun informal) dalam pembangunan SDM industri pariwisata. Dalam penataan ini, perlu diperhatikan antara lain masalah koordinasi antar daerah (propinsi, kota dan kabupaten), kapasitas dan kapabilitas lembaga SDM pariwisata, dan kepemimpinan daerah. Berbagai *role model* atau contoh keberhasilan yang telah dilakukan oleh berbagai instansi pemasok SDM yang berkualitas dan professional perlu menjadi masukan bagi instansi SDM di lain daerah.

Selain melibatkan peran daerah dalam peningkatan kualitas SDM, perhatian terhadap pembiayaan dan investasi SDM industri pariwisata oleh setiap daerah mutlak diperlukan. Hal ini disebabkan pengalaman lapangan mengindikasikan masalah pembiayaan dan investasi SDM oleh daerah masih nyaris terbatas, jika tidak hendak dikatakan nihil. Sebaliknya, pembiayaan dan investasi SDM pariwisata daerah masih sangat bergantung dari pembiayaan pusat dan bahkan luar negeri. Cara pembiayaan dan investasi SDM pariwisata oleh daerah yang dimaksud ini tidak boleh diartikan sebatas bagaimana “menguras” dana APBD, tetapi lebih ditekankan pada bagaimana daerah mencari sumber pembiayaan SDM dari sektor swasta. Bentuk CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan oleh hotel-hotel bintang lima merupakan salah satu contoh sumber pembiayaan dan investasi SDM pariwisata yang dapat dilakukan.

Bahkan bentuk kemitraan antara pemerintah dan swasta di daerah (*public private partnership*) perlu diupayakan dalam program pengembangan ketrampilan (*skills development*). Kemitraan tersebut perlu diperluas tidak hanya terbatas dalam mengatasi keterbatasan dana, tetapi juga membantu dalam memperbaharui dan

mengembangkan ketrampilan yang tepat dan dibutuhkan sektor pariwisata. Misalnya dengan pembentukan badan konsultasi bisnis dengan tugas membantu perbaikan kurikulum pendidikan dan ketrampilan SDM sektor pariwisata atau bantuan dalam penyediaan pengajar di perguruan tinggi pariwisata daerah.

Pengembangan Kemampuan SDM di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Bidang Kehumasan

Pengembangan kemampuan SDM pariwisata di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seyogyanya juga dapat lebih diberdayakan. SDM industri pariwisata harus melek terhadap perkembangan media sosial dan perkembangan teknologi digital 4.0 saat ini. Hal ini dimaksudkan agar SDM pariwisata dapat mempromosikan keunggulan wisata daerahnya dibandingkan lokasi wisata di luar negeri. Hal yang sama dan perlu terus ditingkatkan kemampuannya yakni peningkatan kualitas SDM industri pariwisata di bidang kehumasan (*public relations*). Pentingnya strategi ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada publik dalam dan

luar negeri tentang kemajuan/inovasi wisata yang telah dilakukan di Indonesia atau di daerah baik dalam hal fasilitas, tujuan wisata, obyek wisata, dan keunggulan wisata nasional dan daerahnya masing-masing. Hal ini untuk lebih meningkatkan daya tarik wisata daerah bagi masyarakat luas. Peningkatan kualitas dan profesionalitas SDM di bidang kehumasan ini juga sekaligus untuk merespons *image* dan persepsi publik yang “hoaks” atau bohong terhadap obyek wisata di daerah. Dengan demikian, berbagai ancaman informasi yang dapat merusak *image* pariwisata daerah dapat segera dihindari.

Pustaka Rujukan

Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). Berita Resmi Statistik-Perkembangan Pariwisata dan Transportasi Nasional Desember 2017. No.13/02/Th.XXI, 1 Februari 2018.

Devezas, T., J. Leitao dan A. Sarygulov, 2017. *Industry 4.0 : Entrepreneurship and Structural Change in the New Digital Landscape*, Springer.

Kementerian Pariwisata, 2016. *Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta.

_____, 2017. *Industri Pariwisata*, Jakarta.

Kompas, 2018. "Lampu Kuning dari Neraca perdagangan", Kompas, 18 Desember 2018, hal 7.

_____, 2018. " Utang Menambah Beban", Komaps, 19 Desember 2018.

Nandi. 2008. *Pariwisata dan Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Bandung: Jurnal "GEA" Jurusan Pendidikan Geografi, 8(1): 1-9.